

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESIAPAN APARATUR  
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL**

**(Survey pada seluruh Dinas Pemerintahan di Kabupaten Pati)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun oleh :**

**Zahida Hanifatun Ni'mah**

**20140420165**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: (1) untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. (2) menguji dan membuktikan mengenai pengaruh komitmen terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. (3) menguji dan membuktikan mengenai pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. (4) menguji dan membuktikan mengenai pengaruh infrastruktur terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sistem aplikasi yang digunakan pemda belum sesuai kebutuhan, Pengendalian atas sistem aplikasi masih lemah. pemda belum menetapkan rencana/strategi atas implementasi SAP berbasis akrual secara formal akibat dari kurangnya komitmen dari pemda. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan, aset, dan TI yang tidak sesuai bidangnya, Pelatihan/sosialisasi SDM terkait implementasi SAP berbasis akrual belum memadai, Regulasi tentang kebijakan akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar kurang jelas dan belum selaras. Metode penelitian ini menggunakan survey. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada aparatur dinas Kabupaten Pati yang menjalankan fungsi akuntansi. Populasi penelitian ini adalah seluruh Dinas di Kabupaten pati dengan obyek penelitian aparatur yang bekerja di Dinas dan menjalankan fungsi akuntansi. Sebanyak 45 kuesioner yang dibagikan yang kembali dan dapat diolah sebanyak 38 kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan uji korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi, komitmen, latar belakang pendidikan, dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

**Kata Kunci : Akuntansi akrual, Akuntansi Sektor Publik, Teknologi Informasi, Komitmen, Latar Belakang Pendidikan, Infrastruktur.**

## **ABSTRACT**

*Research objectives are: (1) to test and prove about the influence of information technology on the readiness of local government officials in implementing accrual-based government accounting standards. (2) test and prove the influence of commitment to the readiness of local government officials in applying accrual-based Government Accounting Standards. (3) test and prove the influence of educational background on the readiness of local government officials in applying accrual-based Government Accounting Standards. (4) test and prove the influence of infrastructure on the readiness of local government officials in implementing accrual-based Government Accounting Standards. The problem in this research is as follows: The application system used by local government not yet according to requirement, Control over application system still weak. local governments have not set a plan / strategy for the formal implementation of SAP-based accruals resulting from a lack of commitment from local governments. Placement of Human Resources (HR) of financial, asset and IT managers that are not in their respective fields, HR Training / socialization related to accrual-based SAP implementation is inadequate, Regulation on accounting policies, Local Government Accounting Systems (SAPD) and Standard Account Charts are less clear and not aligned. This research method uses a survey. Data collection in this study uses a questionnaire. Questionnaires submitted to the apparatus of the Pati Regency office that performs accounting functions. The population of this study is all of the Service in Regency starch with the object of research apparatus who work in the Office and perform accounting functions. A total of 45 distributed questionnaires were returned and can be processed as many as 38 questionnaires. The data collected were processed using correlation test. The results of this study indicate that information technology, commitment, educational background, and infrastructure have a significant effect on the readiness of local government apparatus in the application of accrual basis accounting.*

**Keywords:** *Accrual Accounting, Public Sector Accounting, Information Technology, Commitment, Education Background, Infrastructure.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik di dunia semakin berkembang dan mengalami berbagai perubahan kelembagaan, organisasi, dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dalam akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam bidang keuangan. Dari perubahan-perubahan tersebut, masyarakat akan berpartisipasi dalam menilai program-program pemerintah untuk menjadikan kinerja pemerintah lebih baik.

Adanya perubahan dalam sektor publik akan berdampak pula dalam perubahan akuntansi sektor publik. Perubahan dalam akuntansi sektor publik yang terjadi yaitu pada sistem akuntansi. Perubahan kebijakan pemerintah ini tertera pada Pasal 36 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya adalah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mensyaratkan pemerintah agar menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya 5 tahun sejak diterbitkannya, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Kemudian pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005

adalah sebagai pedoman pelaksanaan sistem akuntansi sesuai dengan SAP, hingga batas waktu yang ditetapkan.

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan bentuk perbaikan sistem akuntansi yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. SAP berbasis kas ini kemudian diganti dengan SAP berbasis akrual yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

Menurut Ardiansyah (2013), SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dapat dikatakan bahwa SAP berbasis akrual dapat meminimalisir pemborosan anggaran keuangan pemerintah daerah karena SAP berbasis akrual mengeluarkan anggaran sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

Namun kenyataannya pada pelaksanaannya hingga akhir tahun 2015, masih banyak daerah yang belum menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dibuktikan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual pada akhir tahun 2015 di beberapa Pemda di Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa masih

banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan SAP berbasis akrual. Hasil dari pemeriksasan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang menghambat penerapan SAP berbasis akrual.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke seluruh dinas di Kab. Pati dan diisi oleh aparatur pemda yang menjalankan fungsi akuntansi. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur yang berada di seluruh dinas di Kab. Pati.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah field research. Peneliti akan mengumpulkan data dari responden secara langsung dari seluruh dinas di Kab. Pati dengan menggunakan instrument berupa kuesioner. Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert.

## HASIL PENELITIAN

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang disebar	45
2	Kuesioner yang kembali	38
3	Kuesioner yang tidak kembali	7
4	Kuesioner yang dapat diolah	38
5	<i>Usable Respon Rate</i>	84,4 %

(Sumber : Data Primer, diolah 2018)

### Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tingkat Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Sub Bagian Keuangan	15	39,5%
Staff Keuangan	23	60,5%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data Primer, Diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa dari 38 responden terdapat 15 responden yang menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan atau sebesar 39.5% dan responden yang menjabat sebagai staff keuangan sebanyak 23 responden atau sebesar 60,5%.

### Uji Korelasi

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis dengan uji korelasi dengan menggunakan SPSS for Windows.

### Variabel Teknologi Informasi dengan Kesiapan Aparatur

	Teknologi Informasi	Kesiapan Aparatur
Teknologi Informasi	Pearson Correlation	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
Kesiapan Aparatur	Pearson Correlation	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil tabel 4.19 menunjukkan hasil bahan uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,752 dengan nilai signifikansi/ p value sebesar 0,000, karena nilai signifikansi  $p > 0,05$ , maka artinya ada hubungan signifikan antara teknologi informasi dengan kesiapan aparatur pemerintah daerah.

**Variabel Infrastruktur dengan Kesiapan Aparatur**

		Infrastruktur	Kesiapan Aparatur
Infrastruktur	Pearson Correlation	1	.708**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	38	38
Kesiapan Aparatur	Pearson Correlation	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil tabel 4.22 menunjukkan hasil bahan uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,708 dengan nilai signifikansi/ p value sebesar 0,000, karena nilai signifikansi  $p > 0,05$ , maka artinya ada hubungan signifikan antara infrastruktur dengan kesiapan aparatur pemerintah daerah.

**Variabel Komitmen dengan Kesiapan Aparatur**

	Komitmen	Kesiapan Aparatur

Komitmen	Pearson Correlation	1	.635**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	38	38
Kesiapan Aparatur	Pearson Correlation	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil tabel 4.20 menunjukkan hasil bahan uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,635 dengan nilai signifikansi/ p value sebesar 0,000, karena nilai signifikansi  $p > 0,05$ , maka artinya ada hubungan signifikan antara komitmen dengan kesiapan aparatur pemerintah daerah.

**Variabel Latar Belakang Pendidikan dengan Kesiapan Aparatur.**

		Latar Belakang Pendidikan	Kesiapan Aparatur
Latar Belakang Pendidikan	Pearson Correlation	1	.369*
	Sig. (2-tailed)		.023
	N	38	38
Kesiapan Aparatur	Pearson Correlation	.369*	1
	Sig. (2-tailed)	.023	
	N	38	38

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil tabel 4.21 menunjukkan hasil bahan uji korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,369 dengan nilai signifikansi/ p value

sebesar 0,023, karena nilai signifikansi  $p > 0,05$ , maka artinya ada hubungan signifikan antara latar belakang pendidikan dengan kesiapan aparatur pemerintah daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Teknologi informasi terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variable teknologi informasi ( $H_1$ ) diperoleh hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Dinas di kab. Pati telah menyediakan perlengkapan berupa software yang mudah untuk dipahami untuk memudahkan penyusunan laporan anggaran, dan instansi juga mengadakan pelatihan untuk mengoperasikan software sebagai upaya untuk mendukung optimalisasi penerapan SAP berbasis akrual. Kemudian instansi juga memberikan dukungan berupa anggaran untuk pengadaan software dan menyiapkan jaringan internet yang terintegrasi dengan system pusat sehingga membantu aparatur meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif khususnya untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas di Kab. Pati memiliki teknologi informasi yang mampu membantu aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Peranan teknologi informasi dalam pemerintah yang didukung oleh komitmen dan latar belakang pendidikan serta infrastruktur mampu mendukung kesiapan aparatur pemda dalam menerapkan SAP berbasis akrual. dapat membantu penerapan SAP berbasis akrual yang akan membentuk akuntabilitas dan independensi dalam diri aparatur sehingga tercipta good governance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2013) menyatakan bahwa teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual. Selanjutnya penelitian Ajhar, dkk (2015) juga menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rizkianci (2016) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

### **2. Komitmen Terhadap Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel komitmen ( $H_2$ ) diperoleh hasil bahwa komitmen berpengaruh signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah mempunyai komitmen yang relatif tinggi, sehingga aparatur mampu menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian senada juga dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2013) yang menemukan, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, Iznillah (2015), dan Rizkianci (2016) menyatakan komitmen berpengaruh signifikan terhadap kesiapan

pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

### 3. Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel latar belakang pendidikan (H3) diperoleh bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan ternyata menentukan siap atau tidaknya aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan akuntansi berbasis akrual. Dalam hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tentu sangat ada kaitannya dengan pendidikan terakhir yang dialami oleh pegawai atau aparatur pemerintah. Hal tersebut tentu berasal dari ilmu pengetahuan yang didapatkan ketika menempuh pendidikan di bangku sekolah atau perkuliahan tentu informasi mengenai akuntansi berbasis akrual juga akan memengaruhi siap tidaknya dalam menyusun laporan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2013) Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Penelitian yang dilakukan Yuliyanto (2015) menyatakan bahwa pendidikan aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

### 4. Infrastruktur Terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel infrastruktur (H4) diperoleh bahwa

infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kesiapan aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada sudah memadai, dengan adanya infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang memadai seperti tanah dan bangunan dan fasilitas yang diberikan kepada aparatur dapat di pergunakan untuk berbagai macam kegiatan, khususnya untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Infrastruktur yang memadai sangat membantu aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan kesiapan sehingga terlaksananya penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma (2013) membuktikan bahwa dengan adanya infrastruktur yang mendukung dapat meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sulaiman dan Abdullah (2016) yang menyatakan infrastruktur memengaruhi secara positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menyatakan infrastruktur berpengaruh positif dan mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Dora (2014) juga menyatakan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar SAP berbasis akrual.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Teknologi informasi, komitmen, latar belakang pendidikan dan infrastruktur, terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan standar



akuntansi berbasis akrual. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kab. Pati pada aparatur dinas menyatakan bahwa :

H<sub>1</sub> diterima, Teknologi informasi berhubungan signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil ini ditunjukkan pada hasil analisis korelasi dengan nilai pearson correlation 0,752 dengan signifikansi 0,000.

H<sub>2</sub> diterima, Komitmen berhubungan signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil ini ditunjukkan pada hasil analisis korelasi dengan nilai pearson correlation 0,635 dengan signifikansi 0,000.

H<sub>3</sub> diterima, Latar belakang pendidikan berhubungan signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil ini ditunjukkan pada hasil analisis korelasi dengan nilai pearson correlation 0,369 dengan signifikansi 0,023.

H<sub>4</sub> diterima, Infrastruktur berhubungan signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil ini ditunjukkan pada hasil analisis korelasi dengan nilai pearson correlation 0,708 dengan signifikansi 0,000.

## SARAN

Saran yang peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yaitu variabel pengalaman, karena pada penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Teknologi Informasi, komitmen, latar belakang pendidikan dan infrastruktur.
3. Memperbanyak jumlah sampel di setiap area survey agar hasil penelitian berikutnya dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adventana, G.A., dan Kurniawan, C.H. (2013), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah provinsi DIY dalam implementasi SAP berbasis akrual menurut PP no. 71 tahun 2010*, Ringkasan Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ajhar, Akram, Pituringsih Endar., 2015. "Faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 62–73.
- Al-Debie and Walker, Martin.1999. *Fundamental Information Analysis: An Extension and UK Evidence. British Accounting Review*, Vol 31, No 3, September 1999.
- Al-Quran dan Terjemahannya. (2013). QS. Al-Isra(17) ayat 26-27. Deperteman Agama RI. Jakarta: Bumi Restu

- Anonim, Media Workshop: *Akuntabilitas Pemda Melalui Penerapan Akrua Basis*, <http://semarang.bpk.go.id/?p=7208>. Diakses tanggal 4 Januari 2018 pk 13.00 WIB.
- Ardiansyah., 2013, “*Factors Affecting the Readiness of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study On Working Units in KPPN Malang’s Working Area)*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1-17.
- Cohen, L., Lawrence, M., Keith, M. (2007). *Research Methods in Education (6<sup>th</sup> Edition)*. New York: Routledge.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. Australian Journal of Management, 16: 49-64.
- Donal E. Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi ke Dua Belas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Grigg, N. Dan Fontane, D. G. 2000, *Infrastructure System Management & Optimazation*. Internasional Civil Engineering Departement Diponegoro University.
- Haag dan Keen. 1996. *Information Technology: Tomorrow’s Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PTRajagrafindo Persada.
- Iznillah, M. Luthfi. (2015). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. Jom FEKON Vol.2, No.2.
- Kusuma, Muhammad Indra Yudha (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah*. Skripsi, Dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mukhlisul Muzahid., 2014. “*Pengaruh Tigkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pegalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara*” Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014 : 179-196.
- Mustofa, Hamim., 2004. *Basis Akuntansi Pemerintahan. Direktorat Jendral Perbendaharaan*. Jakarta.
- Mutmainah, Mutara., (2015). “*Implementation of accrual accounting: Review if readiness and arising problem*”. 3<sup>rd</sup> global conference on business and social science.
- Neuman, W.L. (2006), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 6th ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Oktaviani, Lidya., (2017). “*Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi*

- dan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Kabupaten Bengkulu Tengah*". Pascasarjana Universitas Bengkulu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- Pollitt, C., 2002. *The New Public Management in International Perspective; an Analysis of Impacts and Effects*. In K. Mc Laughlin, S.T. Osborne and Ferlie, E. (Eds.), *New public management, The current trends and future prospects* (Routledge), 274-92.
- Pratiwi, Annisa Intan, Rahayu Sri, Zutilisna Djusnimar., (2017). *"Teknologi informasi, sumber daya manusia, komitmen dan komunikasi terhadap kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada pemerintah kota Bandung (Studi Kasus: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2015)"*. e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2 Agustus 2017 | Page 1612.
- Putra, I.W.Y.D dan Ariyanto Dodik., 2015, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI"*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 14-32.
- Raharjo, Budi., 2015, *"Faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akruaI di Kabupaten Magelang"* Skripsi. FEB, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ririz, Setiawati. Kusuma., 2013, *" Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI"* Skripsi. FE. Universitas Jember.
- Rizkianci, Anggi., (2016). *"Faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau"*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Setyaningsih Titik, 2013, *"studi eksplorasi tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akruaI "*. Universitas Sebelas Maret.
- Sjabadhyni, Bertina., dkk. (2001). *Manajemen Pegawai- Psikologi Industri*. Jakarta: Universitas Indonesia - Bagian Psikologi Industri dan Organisasi.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.

Sulaiman & Abdullah., (2016). “*Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual*”. JAFFA Vol. 04 No. 2 Oktober 2016 Hal. 83 – 100.

Thompson, Heather, 2008. *Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management, BARBADOS*.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Usman, Sunanda R, Ida Farida., 2014, “*Analisis yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*” Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 15 No.2.

Widjarso, Bambang., 2008, *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.

Yuliyanto, Muhammad. Arif., 2015, “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesiapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis akrual*” Skripsi. FEB, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.